



Etika Algoritma Rekomendasi Media Dan Polarisasi

Mochammad Naufal

Institut Agama Islam Al Khoziny, Sidoarjo, Indonesia
Email penulis korespondensi: autharnaval@gmail.com

ABSTRAK

Algoritma rekomendasi merupakan elemen sentral dalam ekosistem digital yang membentuk distribusi informasi dan persepsi sosial. Penelitian ini menganalisis implikasi etis desain algoritma rekomendasi terhadap polarisasi media dan masyarakat dalam konteks global dan Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menelaah literatur internasional dan nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa algoritma rekomendasi tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi kepentingan ekonomi yang mengutamakan engagement dibanding kualitas informasi. Kondisi ini mendorong terbentuknya filter bubble dan echo chamber yang mempersempit ruang diskursus publik dan memperkuat polarisasi politik. Di Indonesia, fenomena tersebut terlihat jelas pada dinamika Pemilu 2024, khususnya di kalangan generasi muda pengguna media sosial. Analisis kritis menunjukkan bahwa algoritma berfungsi sebagai instrumen kuasa dalam membentuk ruang publik digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip etika, kebijakan publik yang kontekstual, literasi digital, dan kolaborasi multipihak guna menjaga kualitas demokrasi dan kohesi sosial.

Kata-kata Kunci: algoritma rekomendasi; etika informasi; polarisasi media; ruang publik digital; demokrasi

ABSTRACT

Recommendation algorithms are central to the digital ecosystem, shaping information distribution and social perception. This study examines the ethical implications of recommendation algorithm design on media and societal polarization in global and Indonesian contexts. Using a qualitative library research approach, the study reviews relevant international and national literature. The findings indicate that recommendation algorithms are not neutral but are driven by commercial interests that prioritize engagement over information quality. This dynamic contributes to the formation of filter bubbles and echo chambers, narrowing public discourse and intensifying political polarization. In Indonesia, these effects became evident during the 2024 general elections, particularly among young social media users. Critical analysis reveals that algorithms function as instruments of power in structuring the digital public sphere. The study concludes that recommendation algorithm design significantly affects democratic quality and social cohesion. Therefore, integrating ethical principles into algorithm development, strengthening context-sensitive public policies, enhancing digital literacy, and fostering multi-stakeholder collaboration are essential to creating a more inclusive and democratic information environment.

Keywords: recommendation algorithms; information ethics; media polarization; digital public sphere; democracy

72

Submitted: September 25, 2025, Accepted: December 12, 2025, Published: December 30, 2025

E-ISSN: 2807-1182 Website: <https://communicatorsphere.org/>

DOI: <https://doi.org/10.55397/cps.v5i2.138>

© 2025 author(s) last name. This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) users can copy and redistribute material in any medium or format with credit to original authors and source.

Korespondensi: Mochammad Naufal. Institut Agama Islam Al Khoziny. Jl. Kh Hamdani, Siwalan, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252. Email: autharnaval@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat dalam mengakses informasi. Algoritma rekomendasi kini menjadi primadona dalam berbagai platform digital, mulai dari media sosial, layanan video daring, hingga portal berita. Adapun fungsi utamanya adalah menyajikan konten yang dianggap paling relevan bagi pengguna berdasarkan data perilaku, preferensi, dan interaksi sebelumnya (Bozdag, 2013). Sehingga, algoritma rekomendasi tidak hanya berperan sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai mekanisme seleksi informasi yang memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.

Walaupun secara praktis meningkatkan kenyamanan pengguna, sistem ini menimbulkan konsekuensi etis dan sosial. Salah satunya yakni penekanan pada keterlibatan (*engagement*) yang sering kali membuat algoritma memprioritaskan konten yang sensasional atau provokatif demi menjaga attensi pengguna (O’Neil, 2016). Hal ini berimplikasi pada terbentuknya *filter bubbles* (Pariser, 2011) dan *echo chambers* (Sunstein, 2017), di mana individu cenderung terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri, sehingga memperbesar risiko polarisasi sosial.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di level global, tetapi juga terjadi di Indonesia. Dalam studi yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa algoritma media sosial dapat mengurangi keterlibatan khalayak luas, meningkatkan kerentanan sosial, bahkan mengancam ketahanan bangsa. Studi terbaru juga menemukan bahwa algoritma platform X pada Pemilu Presiden 2024 memperkuat solidaritas kelompok sekaligus memperdalam polarisasi antarpendukung, terutama melalui pembentukan *echo chamber* digital (Neima Aulia & Sopian, 2025). Disamping itu, kalangan Gen-Z cenderung terjebak dalam *filter bubble* politik yang membuat keyakinan mereka terhadap pilihan tertentu semakin mengeras, karena paparan informasi alternatif yang semakin terbatas (JIIP, 2024).

Dalam referensi yang lain masih dalam konteks politik, algoritma rekomendasi juga memiliki implikasi serius. Di berbagai negara, algoritma media sosial berperan dalam kampanye politik, penyebaran hoaks, dan polarisasi masyarakat (Tufekci, 2015; Allcott & Gentzkow, 2017). Di Indonesia sendiri, fenomena buzzer politik, penyebaran disinformasi melalui WhatsApp, serta dominasi konten emosional di TikTok dan Twitter menunjukkan bagaimana algoritma berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi (Lim, 2017; Nugroho, 2024).

Dari perspektif filosofis, Foucault (1980) mengingatkan bahwa teknologi informasi tidak pernah netral, melainkan bagian dari “rezim kebenaran” yang menentukan apa yang sah untuk

diketahui. Habermas (1989) menambahkan bahwa distorsi komunikasi dalam ruang publik dapat melemahkan demokrasi deliberatif. Dengan kata lain, algoritma rekomendasi dapat dipahami bukan sekadar sebagai teknologi, tetapi juga instrumen kekuasaan yang berpotensi membentuk opini publik secara sistematis. Permasalahan etis disini mulai muncul ketika kepentingan ekonomi platform yang didorong oleh logika kapitalisme pengawasan (Zuboff, 2019) berbenturan dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan pluralisme informasi. Sehingga terdapat tanda tanya penting yang kemudian muncul adalah yakni tentang bagaimana seharusnya algoritma rekomendasi dirancang agar tidak hanya melayani kepentingan komersial, tetapi juga menjaga kohesi sosial serta kualitas ruang publik?

Artikel ini bertujuan untuk menelaah persoalan tersebut melalui studi pustaka, dengan menekankan aspek etika desain algoritma rekomendasi dan implikasinya terhadap polarisasi media. Analisis diarahkan pada tiga dimensi: epistemologis, etis, dan politis, sehingga dapat memberikan kerangka konseptual untuk memahami sekaligus mengkritisi peran algoritma dalam ekosistem digital kontemporer.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa isu etika algoritma rekomendasi dan polarisasi media merupakan persoalan yang lebih tepat dianalisis melalui kajian konseptual, refleksi kritis, serta penelusuran literatur daripada melalui pengukuran kuantitatif. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelusuri perkembangan diskursus global sekaligus mengaitkannya dengan dinamika lokal di Indonesia, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam (Zed, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga kategori utama. Pertama, literatur internasional yang menjadi fondasi konseptual, meliputi buku, artikel ilmiah, serta teori terkait etika algoritma (Floridi, 2013; Floridi & Cowls, 2019; Mittelstadt dkk., 2016), polarisasi digital (Pariser, 2011; Sunstein, 2017), kritik filosofis (Foucault, 1980; Habermas, 1989; Zuboff, 2019), dan studi kasus global seperti Cambridge Analytica (Isaak & Hanna, 2018) maupun hoaks Pemilu AS (Allcott & Gentzkow, 2017). Kedua, literatur nasional yang secara khusus membahas media sosial dan polarisasi di Indonesia, seperti kajian Rahmawati (2020), Lim (2017), Raza, Aulia & Sopian (2025), serta riset JIIP (2024) dan Fajarini dkk. (2025). Ketiga, sumber fenomena lokal dan laporan riset dari institusi maupun media daring, misalnya laporan UGM (2023) tentang hoaks Pemilu 2024, UPN Veteran Jakarta (2024) terkait kampanye politik

digital, serta publikasi dari BBC Indonesia, Tirto.id, Tempo, Kompas, dan Katadata mengenai buzzer politik, hoaks WhatsApp, dan konten politik di TikTok.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur ilmiah melalui basis data daring seperti Google Scholar, Scopus, dan DOAJ, serta menelaah buku-buku relevan dan jurnal nasional yang terindeks. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tiga kriteria utama, yakni: keterkaitan langsung dengan isu algoritma rekomendasi, polarisasi media, atau etika informasi; reputasi akademik serta kredibilitas penulis; dan tahun publikasi, dengan prioritas pada dua dekade terakhir. Pengecualian diberikan pada teori klasik seperti Foucault (1980) dan Habermas (1989) yang tetap relevan sebagai landasan filosofis.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi tematik sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data, yaitu memilih literatur yang relevan dengan pertanyaan penelitian; (2) kategorisasi, dengan mengelompokkan temuan ke dalam tiga lensa utama, yakni etika algoritma, teori polarisasi, dan kritik filosofis; (3) sintesis, yakni mengintegrasikan hasil kajian global dengan konteks lokal untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif; serta (4) refleksi kritis, yaitu menghubungkan temuan dengan isu demokrasi, pluralisme, serta dinamika ruang publik digital di Indonesia.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan literatur internasional, nasional, dan dokumen resmi. Selain itu, analisis dilakukan secara kritis-komparatif, yakni menguji konsistensi antara teori universal dengan realitas lokal. Dengan strategi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, objektif, dan relevan dengan tantangan etika informasi serta polarisasi media di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Algoritma Rekomendasi Dalam Memperkuat Polarisasi Media

Algoritma rekomendasi dirancang untuk mengoptimalkan relevansi konten berdasarkan preferensi pengguna. Akan tetapi, logika personalisasi ini kerap berdampak pada penyempitan paparan informasi dengan membentuk *filter bubble* (Pariser, 2011) dan *echo chamber* (Sunstein, 2017). Alih-alih memperluas keragaman perspektif, algoritma justru meneguhkan keseragaman pandangan, sehingga memperkuat fragmentasi opini dan memperdalam polarisasi media.

Di Indonesia sendiri, dinamika tersebut memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap kohesi sosial dan politik. Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa sistem rekomendasi media sosial berkontribusi pada meningkatnya polarisasi yang berpotensi melemahkan ketahanan nasional. Studi Raza, Aulia, dan Sopian (2025) mengonfirmasi terbentuknya *echo chamber* digital selama kontestasi politik, sementara Fajarini, Pratama, dan Lestari (2025) menemukan bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, semakin rentan terjebak dalam *filter bubble* politik akibat intensitas konsumsi media digital yang tinggi.

Lebih jauh, algoritma rekomendasi tidak hanya menyaring informasi, tetapi juga mengutamakan viralitas konten yang bersifat emosional dan ekstrem demi meningkatkan keterlibatan pengguna. Pola ini memperbesar bias informasi dan mempercepat penyebaran disinformasi, sebagaimana terlihat dalam maraknya hoaks politik di WhatsApp menjelang Pemilu 2024 (UGM, 2023) serta dominasi konten partisan di TikTok (Kompas, 2023). Dengan demikian, algoritma rekomendasi berperan aktif dalam memperkuat segregasi sosial-politik dengan memprioritaskan metrik keterlibatan dibandingkan keterbukaan dialog dan deliberasi publik yang sehat.

Tabel 1 Keterkaitan antara teori global mengenai *filter bubble*, *echo chamber*, bias algoritmik, serta polarisasi politik

| Perspektif | Literatur Global | Fenomena Lokal Indonesia |
|---------------------------|---|---|
| Filter bubble | Pariser (2011) – algoritma membuat gelembung informasi yang homogen | Fajarini dkk. (2025) – Gen Z terjebak dalam <i>filter bubble politik</i> |
| Echo chamber | Sunstein (2017) – ruang gema digital memperkuat segregasi opini | Raza, Aulia & Sopian (2025) – <i>echo chamber</i> politik di media sosial Indonesia |
| Bias algoritmik | Bozdag (2013) – algoritma tidak netral, memfilter sesuai preferensi | Rahmawati (2020) – algoritma sosial media mengancam ketahanan bangsa |
| Polarisasi politik | Allcott & Gentzkow (2017) – media sosial mempercepat polarisasi | UGM (2023) – hoaks politik di WhatsApp; Kompas (2023) – dominasi konten politik di TikTok |

Berdasarkan Tabel 1, memperlihatkan bahwa pola polarisasi yang dikaji secara global (Pariser, 2011; Sunstein, 2017; Bozdag, 2013) menemukan pembuktianya di Indonesia melalui riset empiris (Rahmawati, 2020; Raza dkk., 2025; Fajarini dkk., 2025). Dengan demikian, polarisasi digital bukan sekadar teori impor, tetapi kenyataan sosial-politik yang nyata.

Implikasi Etis Desain Algoritma Rekomendasi Terhadap Ruang Public Digital

Dari sudut pandang etika informasi, desain algoritma rekomendasi menghadirkan persoalan normatif yang signifikan bagi keberlangsungan ruang publik digital. Model personalisasi yang berorientasi pada optimalisasi keterlibatan pengguna kerap mengesampingkan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, sehingga membuka ruang bagi praktik manipulatif dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu (Mittelstadt et al., 2016; Floridi & Cowls, 2019). Ketika mekanisme seleksi dan pemeringkatan konten beroperasi secara tertutup, publik kehilangan kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi proses yang membentuk eksposur informasi mereka, menjadikan algoritma bersifat *opaque* dan sulit dipertanggungjawabkan (Floridi, 2013).

Dalam konteks Indonesia, problem etis ini tercermin dalam penggunaan algoritma untuk mengamplifikasi narasi politik partisan melalui jaringan buzzer dan kampanye digital tersegmentasi (Katadata, 2024; Tempo, 2020). Praktik semacam ini menggeser fungsi ruang publik digital dari arena pertukaran argumen yang inklusif menjadi medium mobilisasi afektif yang memperdalam polarisasi. Konsekuensinya, kualitas deliberasi publik melemah, sementara potensi manipulasi opini meningkat, menimbulkan ancaman jangka panjang terhadap integritas proses demokratis.

Kritik Filosofis, Kuasa, Kapitalisme, dan Ruang Publik

Di luar pertimbangan etika normatif, algoritma rekomendasi dapat diposisikan sebagai bagian integral dari konfigurasi kuasa yang membentuk produksi pengetahuan dan pola komunikasi dalam ruang publik digital. Sejalan dengan pemikiran Foucault (1980), proses pembentukan dan distribusi kebenaran tidak pernah terlepas dari relasi kuasa; dalam konteks ini, algoritma beroperasi sebagai mekanisme selektif yang menentukan wacana mana yang memperoleh visibilitas, legitimasi, dan daya pengaruh di ranah digital. Dengan demikian, algoritma tidak bersifat netral, melainkan aktif dalam mengkonfigurasi batas-batas wacana publik.

Kritik terhadap kapitalisme pengawasan memperdalam analisis ini dengan menunjukkan bahwa logika operasional algoritma didorong oleh kepentingan komersial untuk mengekstraksi dan mengkomodifikasi perhatian pengguna (Zuboff, 2019). Dalam konteks tersebut, nilai

informasi dan kualitas deliberasi menjadi subordinat terhadap metrik keterlibatan. Sejalan dengan itu, O’Neil (2016) memperingatkan bahwa sistem algoritmik yang tidak transparan dan minim pengawasan berpotensi memperkuat ketimpangan sosial dan menghasilkan dampak politik yang merugikan. Oleh karena itu, algoritma rekomendasi harus dipahami bukan sekadar sebagai teknologi cerdas, melainkan sebagai infrastruktur epistemik dan ekonomi yang secara sistematis membentuk dinamika kekuasaan, produksi makna, dan praktik demokrasi di ruang publik digital.

Tabel 2 Implikasi etis algoritma, risiko diskriminasi, kapitalisme pengawasan, serta praktik buzzer politik

| Perspektif | Literatur Global | Fenomena Lokal Indonesia |
|------------------------|--|--|
| Etika algoritma | Floridi (2013); Floridi & Cowls (2019) – prinsip AI etis | UPN Veteran Jakarta (2024) – etika kampanye digital |
| Risiko & diskriminasi | Mittelstadt dkk. (2016) – risiko manipulasi & diskriminasi algoritma | Katadata (2024); Tempo (2020) – praktik buzzer politik di Indonesia |
| Kapitalisme pengawasan | Zuboff (2019) – algoritma dikendalikan logika komersial | Buzzer & iklan politik berbayar yang memanfaatkan algoritma (Tempo, 2020) |
| Senjata algoritmik | O’Neil (2016) – weapons of math destruction | JIIP (2024) – laporan tentang polarisasi digital sebagai ancaman demokrasi |

Tabel 2, memperlihatkan bahwa tantangan etis algoritma tidak berhenti pada bias teknis, melainkan berimplikasi luas terhadap demokrasi dan ruang publik. Jika ruang publik ideal menurut Habermas (1989) menuntut keterbukaan dan deliberasi, maka realitas digital Indonesia justru bergerak menuju tribalistik digital (Lim, 2017), di mana algoritma lebih mengutamakan sensasi dan konflik ketimbang dialog.

Prinsip Dalam Merancang Algoritma Rekomendasi Yang Bertanggung Jawab Secara Sosial

Merancang algoritma rekomendasi yang lebih etis dan bertanggung jawab secara sosial memerlukan landasan normatif yang jelas. Literatur etika teknologi, khususnya dari Floridi

(2013) serta Floridi dan Cowls (2019), menawarkan kerangka prinsip-prinsip moral yang dapat dijadikan pijakan. Prinsip *beneficence* menuntut agar algoritma membawa manfaat bagi pengguna dengan memperluas akses terhadap informasi yang relevan dan beragam, bukan sekadar meningkatkan keterlibatan berbasis sensasi. Prinsip *non-maleficence* menekankan kewajiban untuk menghindari kerugian, termasuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau konten ekstrem yang dapat memperburuk polarisasi.

Selanjutnya, prinsip *autonomy* berkaitan dengan hak pengguna untuk memiliki kendali atas pengalaman digital mereka, termasuk opsi untuk menyesuaikan pengaturan rekomendasi atau menolak personalisasi tertentu. Prinsip *justice* menuntut distribusi manfaat dan risiko algoritma secara adil, sehingga tidak ada kelompok sosial tertentu yang terdampak secara diskriminatif. Terakhir, prinsip *explicability* menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas: pengguna berhak mengetahui logika dasar yang mengatur rekomendasi konten, serta mekanisme pengawasan publik terhadap praktik algoritmik.

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi krusial untuk menjaga integritas demokrasi digital. Fenomena buzzer politik dan iklan kampanye berbasis algoritma (Katadata, 2024; Tempo, 2020) menunjukkan pentingnya regulasi yang mengatur transparansi algoritma dan iklan politik daring. Inisiatif lokal, seperti penelitian UPN Veteran Jakarta (2024) mengenai etika kampanye digital, dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan pedoman nasional yang berpihak pada pluralisme dan ketahanan sosial. Dengan demikian, prinsip etis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi instrumen praktis untuk menyeimbangkan kepentingan komersial, kebebasan berekspresi, dan tanggung jawab sosial dalam ekosistem digital.

Tabel 3 Prinsip-prinsip etis dalam merancang algoritma rekomendasi yang bertanggung jawab secara sosial

| Prinsip Etis | Makna | Penerapan di Indonesia |
|--|---|--|
| Beneficence (kebaikan) | Algoritma harus memberi manfaat bagi pengguna, bukan sekadar meningkatkan <i>engagement</i> . | Menyediakan rekomendasi berita yang beragam agar pengguna tidak hanya terpapar konten partisan. |
| Non-maleficence (tidak merugikan) | Menghindari kerugian sosial seperti hoaks, ujaran kebencian, atau ekstremisme. | Penyaringan otomatis untuk mencegah viralnya hoaks politik di WhatsApp dan TikTok (UGM, 2023; Kompas, 2023). |

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Autonomy (otonomi pengguna) | Memberi kendali kepada pengguna untuk menyesuaikan algoritma sesuai kebutuhan. | Fitur <i>opt-out</i> dari personalisasi iklan politik; opsi untuk memilih sumber berita alternatif. |
| Justice (keadilan) | Menjamin distribusi manfaat dan risiko secara adil, tanpa diskriminasi kelompok. | Algoritma yang tidak bias terhadap kelompok minoritas atau oposisi politik. |

SIMPULAN

Studi ini berusaha menunjukkan bahwa algoritma rekomendasi memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk dinamika ruang publik digital, baik dari aspek polarisasi media maupun implikasi etis yang menyertainya. Pertama, algoritma rekomendasi terbukti memperkuat polarisasi media melalui mekanisme *filter bubble* dan *echo chamber*. Proses personalisasi konten yang berorientasi pada preferensi pengguna justru mempersempit keragaman informasi, mendorong bias kognitif, dan memperkeras segregasi sosial-politik. Fenomena global ini menemukan pembuktianya di Indonesia melalui maraknya hoaks di WhatsApp, dominasi konten politik di TikTok, serta penelitian empiris yang menegaskan adanya *echo chamber* dan *filter bubble politik* di kalangan Gen Z dan milenial.

Kedua, implikasi etis dari desain algoritma rekomendasi menimbulkan dilema serius terhadap ruang publik digital. Alih-alih menjadi arena deliberasi sebagaimana digagas Habermas, ruang publik digital kerap berubah menjadi arena tribalistik yang dipengaruhi logika algoritmik. Fenomena buzzer politik dan kampanye digital di Indonesia memperlihatkan bagaimana algoritma dimanfaatkan untuk mengarahkan opini publik, yang selaras dengan kritik global tentang kapitalisme pengawasan (Zuboff, 2019) dan *weapons of math destruction* (O’Neil, 2016). Hal ini mengancam integritas demokrasi digital serta memperlebar kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Ketiga, untuk merancang algoritma rekomendasi yang lebih bertanggung jawab secara sosial, diperlukan prinsip etis yang jelas sebagai pedoman normatif. Prinsip *beneficence* menuntut algoritma memberi manfaat dengan memperluas akses terhadap informasi beragam; *non-maleficence* mengharuskan pencegahan kerugian sosial seperti hoaks dan ujaran kebencian; *autonomy* menjamin kendali pengguna atas personalisasi konten; *justice* memastikan distribusi manfaat dan risiko secara adil; serta *explicability* menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip

ini dapat diwujudkan melalui regulasi transparansi iklan politik digital, pengawasan independen terhadap algoritma, serta edukasi literasi digital yang memperkuat daya kritis masyarakat.

Dengan demikian, algoritma rekomendasi bukanlah entitas netral, melainkan instrumen sosial-politik yang memiliki dampak langsung terhadap demokrasi dan kohesi sosial. Upaya membangun ekosistem digital yang sehat di Indonesia harus berangkat dari kesadaran etis, regulasi yang kuat, serta keterlibatan multi-pihak—pemerintah, industri teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk memastikan bahwa algoritma rekomendasi mendukung pluralisme, keadilan, dan ketahanan bangsa.

Terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah dan regulator perlu merumuskan regulasi transparansi algoritma, membentuk lembaga pengawas independen untuk audit algoritma, serta memasukkan etika algoritma dan literasi digital dalam kebijakan pendidikan. Platform media sosial dan industri teknologi disarankan mengadopsi prinsip responsible recommendation system, menyediakan opsi kontrol personalisasi konten bagi pengguna, dan memperkuat moderasi berbasis AI. Akademisi dan peneliti diharapkan melanjutkan riset interdisipliner mengenai etika algoritma, mengembangkan alat ukur transparansi, serta membangun basis data riset lokal untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Sementara itu, masyarakat sipil dan pengguna perlu meningkatkan literasi digital, mendorong advokasi publik, serta membangun perilaku digital yang sehat dengan membuka diri terhadap beragam perspektif guna mengurangi risiko filter *bubble*.

DAFTAR PUSTAKA

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- BBC Indonesia. (2019, April 3). Pemilu 2019 dan banjir hoaks di WhatsApp. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47804226>
- Bozdag, E. (2013). Bias in algorithmic filtering and personalization. *Ethics and Information Technology*, 15(3), 209–227. <https://doi.org/10.1007/s10676-013-9321-6>
- Fajarini, N., Pratama, A., & Lestari, D. (2025). Generasi Z dalam filter bubble politik: Studi kasus pemilu digital. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia (JIIP)*, 10(1), 15–34
- Floridi, L. (2013). *The ethics of information*. Oxford University Press
- Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1). <https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1>
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press
- Isaak, J., & Hanna, M. J. (2018). User data privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and privacy protection. *Computer*, 51(8), 56–59. <https://doi.org/10.1109/MC.2018.3191268>

- JIIP. (2024). *Laporan tahunan: Polarisasi politik di era media digital*. Jurnal Ilmu Politik Indonesia
- Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan (JIIP). (2024). Media sosial, generasi Z, dan polarisasi politik: Studi kasus Pemilu 2024. *JIIP: Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 11(2), 123–137
- Katadata. (2024, February 12). Buzzer politik dan perang opini di media sosial. <https://katadata.co.id>
- Kompas. (2023, November 15). Konten politik di TikTok dominasi jelang Pemilu 2024. <https://kompas.id>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2), 1–21. <https://doi.org/10.1177/2053951716679679>
- O’Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. Crown
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press
- Rahmawati, I. (2020). Media sosial, algoritma, dan ancaman polarisasi terhadap ketahanan bangsa. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 227–244. <https://doi.org/10.22146/jkn.57428>
- Rahmawati, I. (2020). Polarisasi politik di media sosial: Tantangan demokrasi digital di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 112–127
- Raza, F., Aulia, N., & Sopian, D. (2025). Echo chamber politik di Indonesia: Analisis algoritma media sosial selama Pemilu 2024. *Jurnal Politik Digital*, 5(1), 77–94
- Raza, M., Aulia, R., & Sopian, A. (2025). Echo chamber dan dinamika politik digital di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Politik Indonesia*, 12(1), 45–67
- Stray, J. (2021). Designing recommender systems to depolarize. *arXiv Preprint*, arXiv:2107.13019. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.13019>
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press
- Tempo. (2020, September 10). Industri buzzer politik di Indonesia. <https://tempo.co>
- Tirto.id. (2021, March 5). Algoritma media sosial dan dampaknya pada demokrasi Indonesia. <https://tirto.id>
- UGM. (2023). *Laporan survei hoaks menjelang Pemilu 2024*. Pusat Kajian Politik dan Media UGM
- UPN Veteran Jakarta. (2024). *Kampanye politik digital dan etika informasi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs